

^BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan seseorang yang sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Fase pemuda merupakan fase progresif dan dinamis. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan manusia usia produktif dalam berbagai kegiatan. Kendati secara definisi pemuda diidentikan dengan hal-hal yang positif namun faktanya tidaklah demikian. Pemuda yang merupakan harapan bangsa dan seharusnya sudah dewasa, sebagian justru saat ini mempertontonkan perilaku perilaku menyimpang layaknya remaja. Dalam beberapa penelitian dikemukakan bahwa faktor yang menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja atau pemuda adalah karena keinginan untuk terlihat modern dan gaul. Untuk mendapat pengakuan, ada sebagian dari kalangan pemuda yang melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan norma dan kebudayaan.

Erickson dikutip Adon Jamaludin Nasrullah (2015:372) menyatakan bahwa penyebab kenakalan yang terjadi di kalangan remaja disebabkan oleh identitas. masa remaja menurutnya adalah masa yang berada pada tahap krisis identitas versus difusi identitas yang harus diatasi. Seorang remaja yang berada pada tahap ini secara biologis berada pada fase pubertas dengan perubahan-perubahan tubuh yang menyimbolkan statusnya. Perubahan sosial juga terjadi berbarengan dengan perubahan biologis yang terjadi. Harapan atau ekspektasi berupa nilai-nilai, ide, motivasi, dan inspirasi bergulat dengan kenyataan bahwa

disisi lain setiap orang memiliki kemampuan berbeda karena perbedaan sumber daya yang ada. Untuk menunjukkan keberdayaannya di dalam menghadapi tuntutan berupa harapan teman sepeergaulannya, sebagian para remaja justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebudayaan yang ada. Sehingga lazimnya, hal ini dikatakan sebagai patologi sosial. (Kartono, 2014: 1).

Kasus kasus seperti merokok di bawah umur, seks bebas, ugal-ugalan di jalan umum, minum-minuman keras, berjudi, mengonsumsi narkoba, bergabung dengan geng motor dan sebagainya adalah fakta bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan karena memang membantu para pemuda untuk melangsungkan kebutuhan akan eksistensinya. Tindakan-tindakan patologis yang dilakukan remaja kadang kala atau beberapa diantaranya bahkan merupakan tindakan yang melanggar hukum atau tindak kriminal. Fenomena ini sudah menjadi bukti yang cukup bahwa pemuda yang notabene adalah penerus generasi bangsa harus dilibatkan dalam program-program pemberdayaan yang berorientasi pada kemajuan baik dari aspek sosial maupun budaya.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tercatat setiap tahunnya terjadi 700 ribu kasus aborsi pada remaja atau sekitar 21,2 % remaja mengaku pernah melakukan aborsi. Aborsi sendiri adalah dampak berbahaya dari perilaku seks bebas. Menurut data yang ada, sekitar 62,7% remaja di Indonesia pernah melakukan hubungan intim atau melakukan seks bebas.

Masalah lain yang juga memprihatinkan perihal kehidupan pemuda yaitu pengangguran. Pengangguran sendiri secara umum diartikan sebagai penduduk

yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi tidak bekerja. Adapun definisi lain pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong kategori angkatan kerja (*labour force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. (Nanga, 2001). Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, negara-negara anggota ECOSOC PBB harus memberikan perhatian khusus mengenai strategi penanganan bersama terhadap pengangguran muda yang semakin banyak. Pembangunan harus lebih memperhatikan lagi anak-anak muda sebagai bibit peradaban. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap pemuda harus senantiasa dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah, LSM, Ormas, atau pun OKP dan sebagainya.

Melihat realitas yang menunjukkan bahwa semakin banyak masalah yang berasal dari anak remaja atau pemuda, maka sudah seharusnya pemberdayaan dilakukan sebagai bentuk upaya membangun kemajuan dan peradaban. Pemberdayaan sendiri menurut Djohani dikutip oleh Oos M. Anwas adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. (Anwas, 2014: 48).

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan

lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. (Anwas, 2014: 49).

Menurut Adon Jamaludin Nasrullah (2014: 245), Walaupun umumnya konsep pemberdayaan selalu terkait dengan kekuasaan yaitu upaya untuk mempengaruhi pihak lain agar berdaya sesuai dengan potensinya masing-masing, namun konsep pemberdayaan selalu berkaitan dengan konteks memposisikan masyarakat. Posisi masyarakat yang diberdayakan haruslah dijadikan sebagai subjek daripada pembangunan itu sendiri. Bila memberdayakan pemuda, maka posisi pemuda adalah sebagai subjek pembangunan dengan usaha-usaha pengembangan potensi, kreasi, dan motivasi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Pemberdayaan pemuda sendiri pada dasarnya merupakan kewajiban pihak otoritatif seperti pemerintah atau pun LSM. Mengenai pemberdayaan yang menfokuskan diri pada pemuda, sebenarnya sudah ada suatu perundang-undangan tentang Kepemudaan. Di dalamnya Undang-Undang tersebut mengatur perihal kewajiban negara memberdayakan pemuda sebagai ujung tombak peradaban. Dalam pasal 24 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemberdayaan pemuda difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. (UU No. 20 Tahun 2009).

Sebagaimana amanat undang-undang tentang pemberdayaan pemuda, maka organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia kemudian hadir dan berusaha untuk melakukan suatu perbaikan kualitas hidup para pemuda.

Memberdayakan pemuda berarti melakukan usaha untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas kelompok pemuda yang tidak berdaya.

Berbagai masalah pemuda yang sudah dikemukakan sebelumnya memang dilakukan juga oleh para pemuda yang ada di kecamatan Ciparay. Fenomena tersebut merupakan suatu permasalahan sosial yang lazimnya umum terjadi di kalangan para pemuda. Melihat fenomena pemuda yang kurang berdaya di Kecamatan Ciparay, maka OKP KNPI kemudian hadir sebagai jawaban atas permasalahan pemuda di Ciparay.

Ciparay yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bandung memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup untuk membangun kemajuan sosial dan budaya. Pemuda yang ada di kecamatan Ciparay adalah kelompok yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan guna mencapai kemajuan sosio-kultural. Namun sama halnya dengan fenomena pemuda yang terjadi di wilayah-wilayah lainnya, pemuda yang ada di kecamatan Ciparay juga terjangkit virus patologi sosial yang merusak tatanan budaya setempat.

Demi meningkatkan kualitas pemuda yang ada di kecamatan Ciparay, maka Organisasi Kepemudaan (OKP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan gerakan konkret untuk melakukan perubahan dengan subjek pemuda sebagai bagian dari kadernya. KNPI hadir dalam rangka mengejawantahkan semangat anak muda dalam proses pembangunan nasional. Ciparay yang merupakan salah satu wilayah cabang KNPI, di dalam program dan kegiatannya senantiasa berusaha memberikan kontribusi dan perubahan positif agar pemuda

yang ada di kecamatan Ciparay bisa lebih berkualitas dan benar benar menjadi bibit-bibit unggul penerus generasi bangsa.

Sudah banyak program yang dilakukan oleh Pengurus Kecamatan KNPI Ciparay dalam rangka mengembangkan kualitas pemuda. Selain berfokus pada usaha meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, KNPI ciparay juga menjadi wadah untuk merencanakan strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat secara umum. Pola-pola pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh KNPI menjadi sesuatu yang menurut peneliti sangat perlu diteliti karena berkaitan dengan konsep pemberdayaan terhadap pemuda.

Salah satu model pemberdayaan yang dilakukan oleh OKP KNPI Ciparay adalah dengan menggunakan model pendekatan sosio-kultural. pendekatan ini dilakukan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai aspek yang mempengaruhinya. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah budaya. salah satu fungsi budaya adalah sebagai pengatur kehidupan manusia. keteraturan yang menjadi inti kebudayaan pada dasarnya dibentuk untuk tujuan memperbaiki kehidupan. Dengan menggunakan model pendekatan sosio-kultural, maka diharapkan kualitas pemuda dapat ditingkatkan beriring dengan terjaganya kearifan lokal.

Program-proram yang disusun dengan maksud memperbaiki kehidupan sosial para pemuda juga memakai strategi budaya untuk meningkatkan partisipasi pembangunan. Sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, maka pemberdayaan yang dilakukan KNPI Ciparay mengacu pada pokok-pokok

program *pertama*, pemantapan dan peningkatan kualitas organisasi. *Kedua*, pemantapan dan peningkatan kualitas kaderisasi. *Ketiga*, pemantapan dan peningkatan kualitas partisipasi pembangunan. *Keempat*, pemantapan dan peningkatan kualitas komunikasi.

Beberapa program yang telah dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan terhadap pemuda adalah mengadakan pengajian mingguan dengan tujuan meningkatkan kualitas spiritual para pemuda di kecamatan Ciparay. Ada juga program safari desa dengan pengadaan pengajian rutin yang dilakukan secara bergilir di desa desa yang ada di Ciparay. Program pemberdayaan di bidang olahraga juga dilakukan oleh KNPI Ciparay dengan mengadakan *open tournament* guna melihat dan menyaring bibit unggul yang memiliki potensi di bidang olahraga. Selain itu ada juga program diskusi dengan tokoh pemuda karang taruna di tiap desa di kecamatan Ciparay, bedah buku, konservasi alam, dan masih banyak program-program lain yang telah dilakukan sebagai upaya pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya pemuda.

Berikut data yang berhasil dihimpun dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan model pendekatan sosio-kultural di Pengurus Anak Cabang:

| No. | Program Pemberdayaan | Jumlah Kader KNPI Ciparay | Angka Partisipasi |
|-----|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | Pengajian Mingguan | 30 Orang | 15 sampai 20 orang |
| 2. | Safari Budaya | 30 orang | 25 orang |
| 3. | Konservasi Alam | 30 orang | 20-25 orang |

| | | | |
|----|-----------------------|----------|-------------|
| 4. | Bedah Buku | 30 orang | 10-15 orang |
| 5. | Pelatihan Minat Bakat | 30 orang | 30 orang |

Secara kuantitas, dari data di atas menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh OKP KNPI Ciparay bisa dinilai lumayan berhasil jika ukurannya adalah partisipasi kader. Namun yang menjadi persoalan adalah fakta bahwa realitas menunjukkan masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan pemuda Ciparay seperti yang telah dijelaskan. Dari total keseluruhan pemuda kader KNPI kecamatan Ciparay, hanya beberapa persen saja yang ikut aktif terlibat dalam program program yang telah dicanangkan.

Persoalan lain dari model pemberdayaan yang diterapkan KNPI Ciparay adalah belum optimalnya kualitas kesejahteraan yang diidamkan. Indikator pembangunan yang berupa partisipasi hanya dapat mengukur segi kuantitas semata. Secara kualitas, faktanya kemajuan yang diinginkan belum bisa tercapai. Kemajuan yang dimaksud disini adalah kemajuan ekonomi. Bagaimanapun, ekonomi merupakan salah satu indikator IPM yang harus dibangun di kalangan pemuda agar terciptanya kesejahteraan sosial.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya terkait erat dengan konsep perubahan social dimana ada dua aspek yang harus dilihat dalam mengukur berhasil tidaknya suatu pemberdayaan. *Pertama*, perubahan social memfokuskan studi pada objek yang sama. *Kedua*, mengkomparatifkan dua situasi waktu yang berbeda. Pemberdayaan yang merupakan usaha untuk melakukan perubahan ke

arah yang lebih baik juga diukur melalui studi tentang perubahan social. (Martono, 2014: 2).

Berkaitan dengan masalah pemberdayaan yang dilakukan oleh KNPI terhadap pemuda di Ciparay, peneliti melihat suatu fenomena berbeda pada program-program pemberdayaan yang dilakukan OKP saat sebelum dan sesudah adanya KNPI di Ciparay. Sebelum adanya KNPI, pemberdayaan berfokus pada pengembangan pemuda anggota Organisasi Kepemudaan tertentu. Seperti misalnya Organisasi Kepemudaan Muhamadiyah, Organisasi Kepemudaan XTC, Pemuda Muslim dan lain sebagainya. Pemberdayaan dengan model tersebut, ternyata tidak dapat mengakomodir seluruh kepentingan pemuda. Tingkat keberhasilannya pun hanya akan dirasakan oleh sebagian kalangan karena lingkup pemberdayaan yang sempit.

Hadirnya kembali KNPI Ciparay setelah sempat vakum beberapa tahun ternyata memberi dampak positif pada pola dan model pemberdayaan yang dilakukan terhadap pemuda. KNPI Ciparay melakukan pemberdayaan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Seluruh Organisasi Kepemudaan yang ada di Ciparay diakomodir oleh KNPI untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pemuda secara lebih luas. Sehingga dengan pola yang demikian, pemberdayaan dinilai dapat berhasil jika indikatornya adalah partisipasi objek yang diberdayakan.

Perubahan pola dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh KNPI, walaupun memang bisa melibatkan seluruh pemuda yang ada, namun hal itu

belum cukup untuk bisa memajukan pemuda secara maksimal. kurangnya kesejahteraan pemuda, masih maraknya kenakalan remaja menjadi bukti bahwa pemberdayaan masih harus terus dikembangkan. Berangkat dari fenomena dan masalah tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mencari model pemberdayaan dan pola pengembangan pemuda yang dilakukan PK KNPI Ciparay.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, maka selanjutnya dilakukan identifikasi masalah. Beberapa masalah yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi para pemuda non kader dan kader OKP KNPI di Kecamatan Ciparay.
2. Pola pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan OKP KNPI Ciparay terhadap kadernya belum mampu mengoptimalkan potensi dan kualitas pemuda.
3. Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh OKP KNPI Ciparay.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi para pemuda non kader dan kader OKP KNPI yang ada di Kecamatan Ciparay?
2. Bagaimana pola pemberdayaan pemuda melalui Organisasi Kepemudaan KNPI Ciparay?

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pemberdayaan pemuda melalui OKP KNPI di Kec. Ciparay?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang sudah dirumuskan tersebut, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi para pemuda non kader dan kader OKP KNPI kecamatan Ciparay.
2. Untuk mengetahui pola pemberdayaan pemuda melalui OKP KNPI di Kecamatan Ciparay.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh OKP KNPI di Kecamatan Ciparay.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik pada tataran praktis maupun bermanfaat pada tataran akademis atau teoritis.

1.5.1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan rujukan dalam usaha membangun kebijakan sosial. Data yang ditemukan pada penelitian secara praktis juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk memecahkan suatu permasalahan sosial yang menyangkut kenakalan remaja dan cara pemberdayaannya.

1.5.2. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian pada tataran teoritis atau akademis ini diharapkan hasil penelitiannya dapat menjadi penambah khazanah pengetahuan ilmu sosial.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori modal sosial. Teori modal sosial sendiri menurut Pierre Bourdieu dalam Sunoto (2014) adalah aspek sosial dan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilembagakan, yaitu keseluruhan sumber daya baik yang actual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengetahui.

Konsepsi Bourdieu tentang modal sosial berkaitan dengan usahanya untuk menemukan proses-proses sosio-kultural yang ada dibalik reproduksi ketimpangan struktur. Bourdieu yang pemikirannya dipengaruhi oleh Anthony Giddens melihat bahwa cara agen bertindak di dalam situasi sosial berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Bagi Bourdieu, para agen interaksi sosial adalah para pelaku strategi (*strategist*), sementara ruang dan waktu merupakan segi yang integral dalam strategi sang actor. Praktik strategis actor menurutnya distrukturkan oleh lingkungan sosiokulturalnya yang dinamakan oleh Bourdieu sebagai habitus. Habitus tersebut meliputi disposisi disposisi terstruktur yang pada gilirannya akan menjadi basis penstrukturan (stukturasi) terus menerus. (Beilharz, 2016: 48).

Modal sosial mengenal tiga aspek penting yang mengindikasikan adanya nilai-nilai sosial yang menurut Robert Putnam dalam Lawang (2004) bahwa social capital ini dilihat sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*Norms*), dan kepercayaan sosial (*Social Trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Sama seperti apa yang dikemukakan oleh Bourdieu yang mengatakan bahwa modal sosial adalah suatu keseluruhan sumber daya baik yang actual maupun potensial, James Coleman dalam George Ritzer (2014) menyatakan bahwa modal sosial merupakan suatu sumber daya yang dikendalikan oleh para actor dan berkepentingan kepadanya. Konsep modal sosial menurut Coleman pada dasarnya berkaitan dengan teori pilihan rasionalnya. Coleman di dalam konseptualisasinya tentang masyarakat berangkat dari persoalan-persoalan level mikro ke level makro. Minat analisisnya tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa untuk memahami level sistemik maka yang diperlukan pertama adalah analisis pada level perorangan atau individu terlebih dahulu.

Menurut Coleman dalam Ritzer (2014), modal sosial sebagai suatu sumber daya yang dikendalikan oleh actor dan berkepentingan dengannya pada akhirnya membuat suatu pertalian hubungan antar berbagai individu sampai pada level yang lebih makro yaitu sistem. Modal sosial menurutnya memiliki tiga bentuk yaitu *pertama*, perilaku kolektif. Perilaku ini merupakan suatu pernyataan teoritis Coleman untuk menjelaskan suatu perilaku kolektif pada fenomena makro. Menurutnya, orang-orang di dalam perilaku ini memberikan kendali secara sepihak kepada orang lain. Tujuan pemindahan sumber daya yang sepihak ini

secara gamblang dapat dipahami sebagai upaya actor atau orang untuk memaksimalkan keuntungan individual. Dengan begitu maka pada level perilaku kolektif ini keseimbangan masyarakat tidak terjamin. **Kedua**, Norma-norma. Coleman menjelaskan bahwa norma adalah penyerahan kendali secara parsial atas tindakan seseorang dan menerima hak-hak kendali secara parsial atas tindakan orang lain. **ketiga**, Aktor korporat. Yang dimaksud actor korporat adalah suatu tindakan level makro yang tidak lagi mementingkan keuntungan individual melainkan lebih mementingkan suatu keuntungan kolektif.

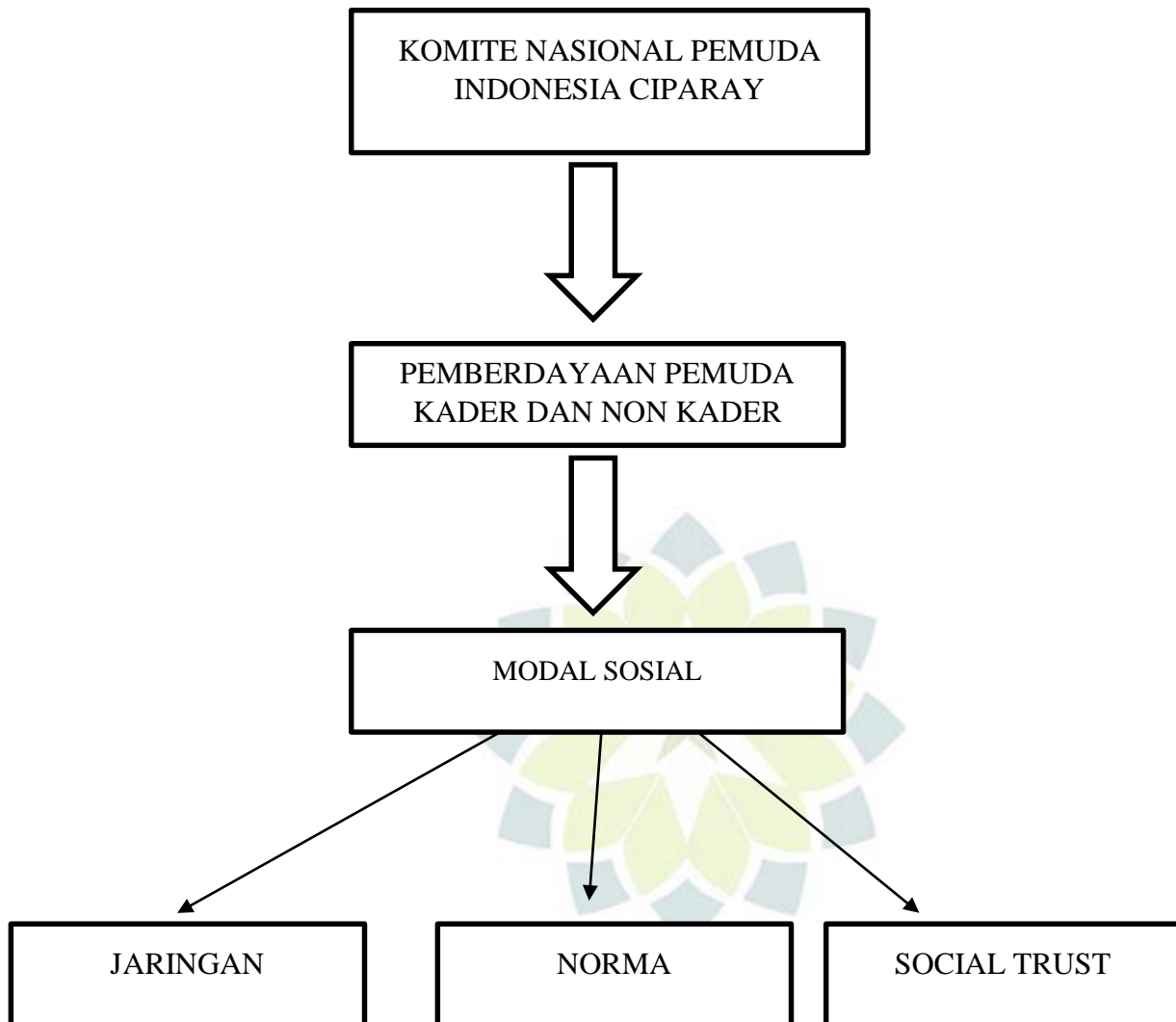
Penggunaan teori modal sosial dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi teori dengan masalah yang akan diteliti. pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan daya tentu salah satu indikator keberhasilannya dilihat dari segi partisipasi subjek yang diberdayakan. konsep modal sosial dari Bourdieu misalnya dapat menjadi pisau analisis untuk membedah perilaku agen yang diberdayakan berkaitan dengan strategi dan habitusnya. Penyebab aktif dan tidak aktifnya anggota kader atau non kader dalam program pemberdayaan yang dilakukan KNPI dengan menggunakan teori ini akan dapat ditemukan faktor faktor sosio kulturalnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bourdeui bahwa analisis sosiologisnya adalah upaya untuk menemukan proses-proses sosio-kultural yang ada dibalik reproduksi ketimpangan struktur.

KNPI Ciparay sebagai suatu Organisasi yang bergerak di lingkup kepemudaan, memang harus mencanangkan program-program tertentu yang mempertimbangkan modal sosial anggota kader ataupun non kader. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan hasil memuaskan berupa kualitas

kualitas subjek yang diberdayakan. pemberdayaan selain melihat segi partisipasi masyarakat sebagai indikatornya, di sisi lain KNPI harus senantiasa bisa meningkatkan segi kualitas dengan cara menyusun suatu program program yang dapat memajukan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Dari hasil obervasi sementara, peneliti melihat adanya suatu fenomena yang menunjukkan bahwa masih banyak terjadi perilaku menyimpang para pemuda sekalipun KNPI Ciparay hadir sebagai agen pemberdayaan. Melihat fenomena tersebut, maka salah satu aspek yang memang sangat perlu diperhatikan oleh KNPI Ciparay adalah kekuatan modal sosial para kader anggota atau non anggotanya. Pentingnya modal sosial untuk dijadikan sebagai acuan pemberdayaan adalah karena pentingnya membangun nilai sebagai konsensus. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Nutman bahwa modal sosial memiliki 3 aspek penting yang mengindikasikan nilai sosial.

Adapun di bawah ini merupakan skema konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Skema Konseptual
UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG